



**STRATEGI OPTIMALISASI PENGGUNAAN  
KARTU TANI DI DESA KALISALAK DAN  
DESA SIDOMULYO KECAMATAN LIMPUNG  
KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Ismi Azida  
NIM 7111413049**

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 21 Agustus 2017

Mengetahui,



Lesta Karolina Br. Sebayang, S.E., M.Si  
NIP. 198007172008012016

Pembimbing



Prof. Dr. Sucihatiningsih DWP., M.Si  
NIP. 196812091997022001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas  
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : *Senin*

Tanggal : *18 September 2017*

Penguji I



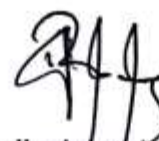
Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si.  
196908212006042001

Penguji II



Lesta Karolina Br. Sebayang SE., M.Si  
198007172008012016

Penguji III



Prof. Dr. Sucihatiningsih DWP., M.Si.  
NIP. 196812091997022001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Wahyono, M.M.  
NIP. 195601031983121001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismi Azida  
NIM : 7111413049  
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 11 Agustus 1995  
Alamat : Jalan Kolonel Sugiono RT 002 RW 002 Desa Taman,  
Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 04 September 2017



Ismi Azida

NIM. 7111413049

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- ✓ *Lakukan semua terbaik sekarang, jangan melihat masa lalu hanya untuk penyesalan, jangan melihat masa depan hanya dengan kegelisahan.*
- ✓ *Apa yang kita miliki saat ini adalah sumber-sumber kebahagiaan bila kita mensyukurinya.*

### PERSEMBAHAN:

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala karunia-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Nabi Muhammad SAW tercinta
2. Ibu dan Bapak serta keluarga besar tersayang
3. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul "Implementasi Kartu Tani Melalui Keuangan Inklusif Sebagai Alat Bantu Pembayaran Pupuk Bersubsidi Di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang" dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (satu) untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Rasa hormat dan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menuntut ilmu.
2. Dr. Wahyono, M.M, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang atas kebijaksanaan, dukungan, doa dan nasihat yang menjadi inspirasi penulis.
3. Lesta Karolina Br. Sebayang, S.E., M.Si. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang sekaligus Penguji 2 yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyusun skripsi dan memberikan bimbingan, motivasi serta saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
4. Dr. Amin Pujiati, S.E.,M.Si. selaku Penguji 1 yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyusun skripsi dan memberikan bimbingan, motivasi serta saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Prof. Dr. Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, M.Si selaku Penguji 3 sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk

menyusun skripsi dan memberikan bimbingan, motivasi serta saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.

6. Fafurida, S.E., M.Sc, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, serta arahan kepada penulis selama masa studi.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang atas semua bekal ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
8. Seluruh jajaran Dinas Pertanian, BPP Kecamatan Limpung, Ketua dan seluruh anggota Kelompok Tani Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
9. Keluarga besar Hima Jurusan Ekonomi Pembangunan dan teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2013, Maskun, Luqman, Isyti dan semua teman yang tidak bisa saya sebutkan, terimakasih pengalamannya.
10. Teman diskusi dan berbagi cerita “Wirosableng 212” Ikim, Adit, Yoga Adhi, dan Yahya Adi Surya, terimakasih atas kebersamaannya, saya bersyukur mengenal kalian.
11. Semua yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Bagi penyusun, kesempurnaan skripsi ini adalah kesediaan pembaca untuk memberikan saran ataupun masukan. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang telah membantu.

Semarang, 04 September 2017



Penulis



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## SARI

**Azida, Ismi.** 2017. “Strategi Optimalisasi Penggunaan Kartu Tani Di Desa Kalisalak Dan Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang” Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing, Prof. Dr. Sucihatiningsih DWP., M.Si.

**Kata kunci : Kartu Tani, Analisis Hierarki Proses, Strategi Optimalisasi**

Kabupaten Batang sebagai kabupaten percontohan kartu tani memiliki tanaman pangan sebagai komoditas unggulan berupa padi dan jagung. Tingginya produksi tanaman pangan tersebut tidak lepas dari peran penduduk yang bekerja pada sektor pertanian tanaman pangan masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Batang. Kecamatan Limpung khususnya di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo adalah salah satu daerah yang memiliki transaksi kartu tani paling banyak akan tetapi penggunaannya belum optimal karena belum semua petani menggunakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manfaat dan permasalahan apa saja dalam pelaksanaan program kartu tani serta untuk menganalisis strategi optimalisasi penggunaan kartu tani di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (*mix method*) yaitu analisis deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi manfaat dan masalah program kartu tani. Dalam menyusun strategi kriteria program yang dapat dilakukan dan strategi yang dapat diprioritaskan untuk mengoptimalkan penggunaan kartu tani menggunakan analisis hirarki proses (AHP).

Strategi optimalisasi penggunaan kartu tani sebagai alat pembayaran pupuk bersubsidi di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo yang dilakukan menggunakan alat analisis AHP secara berturut-turut terpilih aspek Bank BRI, aspek kios pengecer, aspek petani, dan aspek pemerintah. Adapun secara keseluruhan urutan alternatif strategi optimalisasi penggunaan kartu tani di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo adalah pembagian Kartu Tani dan buku rekening dengan dibantu oleh petugas penyuluh serta aparat desa setempat,

Saran dari penelitian ini yaitu untuk pihak penyuluh, perbankan, pihak aparat desa dan universitas agar lebih rutin memberikan penyuluhan dan *sharing* informasi terbaru tentang teknologi atau layanan perbankan kepada petani. Selanjutnya diperlukan adanya kesinambungan dari petani, kios pengecer, penyuluh pertanian dan bank BRI sehingga semua pihak *open-minded* dan berusaha melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama karena keempat pihak tidak dapat berdiri sendiri, oleh karenanya diperlukan kerjasama yang sinergis dan seimbang. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian yang membandingkan perbedaan sebelum dan sesudah diterapkan kartu tani secara komprehensif.

## **ABSTRACT**

**Azida, Ismi.** 2017. “*Optimization Strategy Of Kartu Tani In Kalisalak and Sidomulyo Villages, Limpung District, Batang Regency*” Final Project. Department of Economic Development. Faculty Of Economics. Semarang State University. Advisor, Prof. Dr. Sucihatningsih DWP., M.Si.

**Keywords :** *Kartu Tani, Analysis Hierarchy Process, Strategy Optimization*

*Batang Regency as a pilot project kartu tani program has food crops such as rice and corn as their best commodity. The high food production doesn't escape from the role of residents who work in the sector of food crops in each district in Batang Regency. One of district that has highest transaction kartu tani is Limpung District that focus in Kalisalak and Sidomulyo Villages, but it's still not optimal. The purpose of this research is to analyze the benefits and problems of kartu tani and the to analyze the optimization strategy of kartu tani in Kalisalak and Sidomulyo Village.*

*The method used in this research is mix method. The qualitative method is used to identify the benefits and problems of the kartu tani and the optimization strategy of kartu tani is using a analysis hierarchy process (AHP).*

*The optimization strategy of kartu tani in Kalisalak and Sidomulyo villages conducted using AHP analysis are selected in particular aspects of BRI bank, retailer aspect, farmer aspect, and government aspect. The overall sequence of alternative strategies for optimizing kartu tani in Kalisalak Village and Sidomulyo Village is the distribution of kartu tani and account book with the assistance of extension staff and local village officials.*

*The suggestions of this research are for extension staff, banking, village officials and universities to more continuously provide counseling and sharing the latest information about technology or banking services to the farmers. Furthermore, there are a need for sustainability from farmers, retailers, agricultural extension workers and BRI bank so that all parties are open-minded and try to do their best for the common good because the four parties can not stand alone, therefore synergic and balanced cooperation is required. Subsequent research can be done research that compares the difference before and after the implementation of kartu tani comprehensively.*

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                        | i       |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....               | ii      |
| PENGESAHAN KELULUSAN .....                | iii     |
| PERNYATAAN.....                           | iv      |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....               | v       |
| PRAKATA.....                              | vi      |
| SARI.....                                 | ix      |
| ABSTRACT .....                            | x       |
| DAFTAR ISI.....                           | xi      |
| DAFTAR TABEL.....                         | xiv     |
| DAFTAR GAMBAR .....                       | xv      |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                      | xvi     |
| BAB I PENDAHULUAN.....                    | 1       |
| 1.1. Latar Belakang.....                  | 1       |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                | 9       |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....               | 10      |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....             | 11      |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA .....               | 12      |
| 2.1. Kajian Teori .....                   | 12      |
| 2.1.1 Teori Akses Keuangan .....          | 12      |
| 2.1.2 Teori Pertanian dan Teknologi ..... | 15      |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.1.3 Teori Pengembangan Keuangan Inkusif Petani .....                           | 16        |
| 2.1.4 Teori Adopsi Teknologi .....   | 17        |
| 2.1.5 Konsep Implementasi Kebijakan.....   | 17        |
| 2.1.6 Reformasi Kredit Pertanian dan <i>Financial Inclusion</i><br>di India..... | 19        |
| 2.1.7 Inklusi Keuangan & Kebutuhan Pembangunan Pertanian                         | 20        |
| 2.1.8 Kartu Tani .....   | 21        |
| 2.1.7 Subsidi Pupuk .....  | 23        |
| 2.1.8.Keuangan Inkusif .....   | 24        |
| 2.2 Kerangka Berfikir.....   | 26        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>  | <b>28</b> |
| 3.1. Metode Penelitian <i>Mix Methods</i> .....                                  | 28        |
| 3.2. Jenis dan Sumber Data .....   | 29        |
| 3.3. Metode Pengumpulan Data .....   | 29        |
| 3.4. Teknik Pengambilan Sampel .....   | 32        |
| 3.5. Metode Analisis.....  | 34        |
| 3.5.1. Analisis Deskriptif .....   | 34        |
| 3.5.2. Analisis Hierarki Proses .....  | 36        |
| 3.6. Variabel Penelitian .....   | 40        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                               | <b>42</b> |
| 4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....  | 43        |
| 4.1.1. Karakteristik Petani .....  | 44        |
| 4.1.2. Keuangan Inkusif Petani .....   | 47        |

|  |    |
|--|----|
| 4.2. Manfaat Kartu Tani .....                          | 50 |
| 4.3. Permasalahan Kartu Tani.....                      | 55 |
| 4.4. Strategi Optimalisasi Penggunaan Kartu Tani.....  | 60 |
| 4.5. Kriteria Optimalisasi Penggunaan Kartu Tani ..... | 61 |
| BAB V PENUTUP .....                                    | 75 |
| 5.1. Simpulan.....                                     | 75 |
| 5.2. Saran .....                                       | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                   | 78 |
| LAMPIRAN.....  | 82 |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1. Transaksi Kartu Tani per Kecamatan di Kabupaten Tahun 2016   | 5  |
| Tabel 1.2. Perbandingan Penerima dan Pengguna Kartu Tani Desa Kalisalak dan<br>Desa Sidomulyo Tahun 2016..... | 8  |
| Tabel 3.1. Data Kelompok Tani Desa Sidomulyo .....  | 33 |
| Tabel 3.2. Data Kelompok Tani Desa Kalisalak.....   | 33 |
| Tabel 3.3. Pembagian Kelas Luas Tanam Padi.....   | 34 |
| Tabel 3.4. Skala Banding Berpasangan.....   | 37 |
| Tabel 4.1. Kebutuhan Pupuk Subsidi Kelompok Tani.....   | 43 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1.1 PDRB Kabupaten Batang Tahun 2012-2016 .....                 | 4  |
| Gambar 2.1. Kerangka Berpikir .....                                    | 27 |
| Gambar 3.1. Kerangka Hierarki AHP .....                                | 41 |
| Gambar 4.1. Petani Berdasarkan Jenis Kelamin .....                     | 44 |
| Gambar 4.2. Petani Berdasarkan Umur.....                               | 45 |
| Gambar 4.3. Petani Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....                | 46 |
| Gambar 4.4. Jarak Tempuh Petani ke Kios Pengecer .....                 | 47 |
| Gambar 4.5. Alat Transportasi Petani ke Kios Pengecer .....            | 48 |
| Gambar 4.6. Biaya Petani ke Kios .....                                 | 49 |
| Gambar 4.7. Kepemilikan Rekening di Lembaga Keuangan.....              | 50 |
| Gambar 4.8. Kriteria Staretegi Optimalisasi Penggunaan Kartu Tani..... | 62 |
| Gambar 4.9. Alternatif Kriteria Bank BRI.....                          | 65 |
| Gambar 4.10. Alternatif Kriteria Kios Pengecer.....                    | 66 |
| Gambar 4.11. Alternatif Kriteria Petani.....                           | 68 |
| Gambar 4.12. Alternatif Kriteria Pemerintah.....                       | 70 |
| Gambar 4.13. Urutan Alternatif .....                                   | 72 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |     |
|---|-----|
| 1. Pedoman Wawancara .....                                  | 83  |
| 2. Kuesioner Analisis Hirarki Proses .....                  | 84  |
| 3. Profil Petani Penerima Kartu Tani .....                  | 88  |
| 4. Profil <i>Keyperson</i> AHP .....                        | 89  |
| 5. Reduksi Hasil Wawancara.....                             | 90  |
| 6. Daftar Permasalahan Kartu Tani Di Kabupaten Batang ..... | 98  |
| 7. Hasil Tabulasi Kuesioner AHP .....                       | 100 |
| 8. Hasil Olah Data Menggunakan AHP .....                    | 101 |
| 9. Surat Ijin Penelitian.....                               | 107 |
| 10. Dokumentasi.....  | 108 |



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan strategis dalam menopang perekonomian Indonesia (Setiawan & Prajanti, 2016). Pada RPJMN tahap ketiga (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045 menjelaskan bahwa pembangunan sektor pertanian pada tahun 2015-2019 akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan,

dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur.

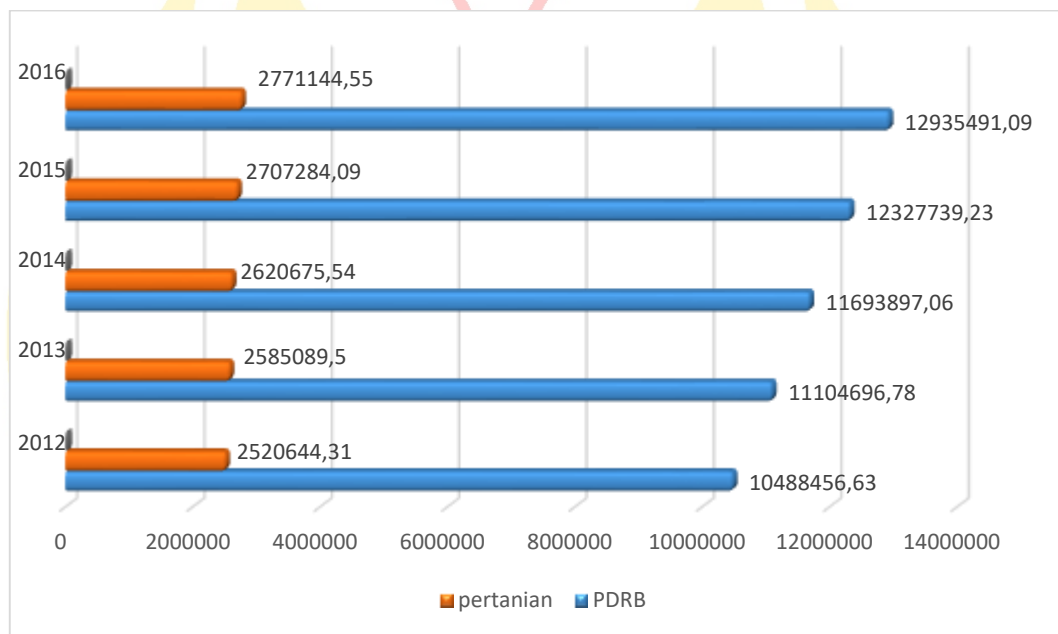
Program pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dapat terlihat dari Nawacita atau agenda prioritas kabinet kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan guna meningkatkan kesejahteraan petani, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Salah satu lumbung pangan utama di Indonesia adalah Provinsi Jawa Tengah dimana selama ini *share* sektor pertanian terhadap total output termasuk salah satu yang terbesar. Pada tahun 2016 sektor pertanian memberikan kontribusi bagi PDRB Jawa Tengah sebesar 116.250.931,53 atau 13,69% dari total PDRB Jawa Tengah (BPS, 2016). Sejalan dengan strategi pemerintah Indonesia untuk memajukan sektor pertanian, Provinsi Jawa Tengah menggunakan dana APBD dan bekerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. membuat aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI) untuk pembayaran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani.

Bank BRI sebagai salah satu bank milik negara telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pemerintah yang ditujukan untuk petani. Dengan dukungan jaringan kerja BRI yang luas tersebar di seluruh pelosok tanah air yaitu 10.396 kantor dan 152.443 *e-channel* Bank BRI siap melayani. Salah satu program BRI yang sebagai bagian dari dukungan BRI pada program Pemerintah yakni *financial inclusion*, BRI berinovasi dengan meluncurkan BRILink, yakni layanan keuangan tanpa kantor (nirkantor). Program ini adalah salah satu terobosan BRI untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, dalam mengenal pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan produk dan layanan perbankan. Melalui kesepakatan bersama Gubernur Jawa Tengah dan Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 004/2015, Nomor B.122-DIR/KPM/03/2015, tentang Kartu Tani sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Jawa Tengah, maka terciptalah kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan BRI. Diharapkan dengan pemanfaatan teknologi perbankan yang dapat mengoptimalkan penyaluran pupuk subsidi (Urea, SP36, ZA, NPK, Organik), hal ini akan memberikan kontribusi bagi kemajuan serta peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya kelompok tani.

Peluncuran kartu tani ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan bagi pelaku kelompok tani. Kartu tani ini merupakan usaha untuk mewujudkan pendistribusian, pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada petani yang berhak menerimanya, juga menjadi salah satu bentuk penyempurnaan data petani. Transparansi dan akurasi data kartu tani sangat penting karena ke depan akan menjadi data pertanian yang lebih luas.

Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki peluang pengembangan sektor pertanian yang cukup besar dimana sektor pertanian menjadi salah satu penopang perekonomian. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1 PDRB Kabupaten Batang Tahun 2012-2016

Sumber: BPS, diolah 2017

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir PDRB Kabupaten Batang mengalami kenaikan dimana sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar diatas 20% dari total PDRB. Nilai tersebut menempati urutan kedua yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB setelah sektor industri pengolahan. Dengan potensi inilah kartu khusus petani yang dapat digunakan untuk memonitor penyaluran pupuk bersubsidi ini pertama kali diujicobakan di Kabupaten Batang pada tahun 2015. Selanjutnya tahun 2016 diujicobakan di 15 Kabupaten (Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Magelang, Klaten, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Pati, Demak, Semarang, Pemalang dan Tegal) 6 Kota (Magelang, Surakarta,

Salatiga, Semarang, Pekalongan dan Tegal). Kemudian dilanjutkan pada tahun 2017 di 13 Kabupaten (Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Rembang, Kudus, Jepara, Temanggung, Kendal, Pekalongan dan Brebes).

Program kartu tani berdasarkan *Grand Design* kartu tani, selain melibatkan petani, juga akan melibatkan kios pengecer, pemerintah dan Bank BRI. Bagi petani yang ingin mendapat kartu tani, cukup dengan langsung mendatangi unit kerja BRI terdekat dan menyerahkan KTP. Jika data tersebut cocok dengan server SIMPI, maka petani dapat langsung membuka rekening BRI dan mendapatkan kartu tani. Kartu tersebut kemudian dapat digunakan untuk membeli pupuk di kios pengecer resmi yang sudah ditunjuk pemerintah.

Hasil pertemuan evaluasi pendataan petani dan distribusi kartu tani di Kabupaten Batang pada tahun 2016 menyebutkan bahwa sebanyak 54.342 kartu yang ditargetkan, sebanyak 47.817 kartu tani sudah tercetak, dari jumlah yang sudah tercetak tersebut, hanya 41.292 yang sudah diambil, artinya ada sebanyak 6.525 kartu belum diambil oleh petani padahal Kabupaten Batang sebagai kabupaten *pilot project* pelaksanaan program kartu tani untuk kabupaten/kota lain di Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi contoh agar pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan tertutup sesuai dengan asas “enam tepat”, serta sebagai bentuk pemberian layanan perbankan bagi petani (Pranowo, 2015).

**Tabel 1.1 Transaksi Kartu Tani per Kecamatan di Kabupaten Batang Tahun 2016**

| No            | Nama Kecamatan | Banyaknya Transaksi |
|---------------|----------------|---------------------|
| 1.            | Bandar         | 0                   |
| 2.            | Banyuputih     | 0                   |
| 3.            | Batang         | 0                   |
| 4.            | Bawang         | 0                   |
| 5.            | Blado          | 0                   |
| 6.            | Gringsing      | 7                   |
| 7.            | Kandeman       | 0                   |
| 8.            | Limpung        | 112                 |
| 9.            | Pecalungan     | 0                   |
| 10.           | Reban          | 0                   |
| 11.           | Subah          | 0                   |
| 12.           | Tersono        | 0                   |
| 13.           | Tulis          | 0                   |
| 14.           | Warungasem     | 0                   |
| 15.           | Wonotunggal    | 0                   |
| 16.           | Wonokerso      | 0                   |
| 17.           | Lobang         | 0                   |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>119</b>          |

Sumber: SIMPI, diolah 2017

Tabel 1.1. menunjukkan apabila dibandingkan dengan jumlah penerima kartu tani di Kabupaten Batang pada tahun 2016 yaitu sebanyak 54.342 orang sedangkan total transaksi penggunaan kartu tani hanya 119 transaksi. Transaksi tersebut dihitung berdasarkan jenis pupuk. Apabila seorang petani membeli 1 Kg pupuk NPK dan 1 Kg pupuk urea menggunakan kartu tani, maka akan terekam kedalam SIMPI sebagai 2 transaksi. Sehingga berdasarkan perbandingan tersebut dapat dikatakan kartu tani belum semua petani melakukan transaksi pembelian pupuk subsidi menggunakan kartu tani. Tabel 1.2 juga memperlihatkan bahwa dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Batang, hanya Kecamatan Limpung dan

Kecamatan Gringsing yang telah melakukan transaksi berupa pembelian pupuk bersubsidi.

Kabupaten Batang berhasil menjadi *pilot project* kartu tani untuk wilayah pulau jawa, namun diawal pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Batang tersebut terdapat permasalahan yang muncul di lapangan. Diantaranya para petani yang sudah masuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tapi belum terdaftar ke Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI). Hal ini terjadi kemungkinan saat pendataan awal belum lengkap, atau petani menolak untuk didata.

Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo sebagai desa dengan jumlah penggunaan kartu tani paling banyak di Kecamatan Limpung, namun apabila dibandingkan antara banyaknya penerima kartu tani dan banyaknya pengguna kartu tani terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Hal ini terjadi kemungkinan karena petani masih enggan membawa kartu tani ketika membeli pupuk kemudian mereka memilih membeli pupuk di kios pengecer selain kios pengecer yang ditunjuk.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dan resiko dari pelaksanaan layanan keuangan digital di Indonesia. Hambatan tersebut antara lain adalah (1) kurang handalnya jaringan bagi pengguna layanan yang mengganggu kelancaran proses transaksi; (2) lemahnya kesadaran pengguna layanan dalam memahami kegunaan dari setiap fitur layanan, risiko yang dapat terjadi, dan cara bertransaksi yang aman.; (3) rendahnya pengetahuan pelanggan terhadap penggunaan layanan; (4) rendahnya kesadaran bagi pengguna layanan untuk memberikan data-data pribadi yang dibutuhkan terkait dengan masalah

privasi untuk mendukung pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

**Tabel 1.2 Perbandingan Penerima dan Pengguna Kartu Tani Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo Tahun 2016**

| No                     | Kelompok Tani | Banyaknya Penerima Kartu Tani | Banyaknya Pengguna Kartu Tani | Persentase Penggunaan Kartu Tani |
|------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Desa Kalisalak:</b> |               |                               |                               |                                  |
| 1                      | Tani Makmur   | 120                           | 9                             | 7,50%                            |
| 2                      | Rejeki        | 49                            | 4                             | 8,16%                            |
| 3                      | Sumber Rejeki | 79                            | 6                             | 7,59%                            |
| <b>Jumlah</b>          |               | <b>248</b>                    | <b>19</b>                     | <b>7,66%</b>                     |
| <b>Desa Sidomulyo:</b> |               |                               |                               |                                  |
| 1                      | Sidomulyo     | 27                            | 1                             | 3,70%                            |
| 2                      | Klinggan      | 108                           | 8                             | 7,41%                            |
| 3                      | Manggisan     | 78                            | 3                             | 3,85%                            |
| 4                      | Blimbing      | 149                           | 8                             | 5,37%                            |
| <b>Jumlah</b>          |               | <b>362</b>                    | <b>20</b>                     | <b>5,52%</b>                     |
| <b>Total</b>           |               | <b>610</b>                    | <b>39</b>                     | <b>6,39%</b>                     |

Sumber: SIMPI, diolah 2017

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 penerima kartu tani di Desa Kalisalak belum semua petani menggunakan kartu tani, dari 348 pemilik kartu tani hanya 7,66% yang sudah menggunakan. Begitu juga di Desa Sidomulyo, dari 362 pemilik kartu tani, hanya 5,52% yang sudah menggunakan. Kemudian secara keseluruhan penerima kartu di kedua desa tersebut adalah 610 orang, dan yang sudah menggunakan kartu tani hanya 6,39%. Berdasarkan petunjuk teknis kartu tani, dalam pelaksanaan pembelian pupuk bersubsidi masing-masing pemilik kartu tani hanya dapat melakukan pengambilan alokasi pupuk subsidi sesuai dengan waktu kebutuhan yang tertera pada RDKK yaitu menjelang musim tanam (3 kali/tahun).

Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan kartu tani di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo dinilai belum optimal karena persentase penggunaannya hanya



6,39%. Permasalahan terkait penggunaan kartu tani di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo dimana belum semua petani menggunakan kartu tani, sedangkan disisi lain untuk program tersebut didanai pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan permasalahan umum yang terjadi pada layanan keuangan digital yaitu pada proses penetrasi layanan tersebut ke masyarakat. Meskipun usaha-usaha sudah dikembangkan untuk memudahkan dan memperluas akses layanan keuangan, pada akhirnya kesediaan masyarakat untuk menggunakan layanan tersebutlah yang akan menentukan keberhasilannya sebagai bagian dari suatu sistem pembayaran (World Bank, 2010). Berdasarkan hal tersebut diperlukan penelitian untuk menganalisis strategi agar kartu tani dapat digunakan lebih optimal oleh petani Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo.

### **1.1. Rumusan Masalah**

Kartu tani merupakan alat bantu mewujudkan pendistribusian, pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada para petani yang berhak, serta pemberian layanan perbankan bagi petani di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan kartu tani tersebut memilih Kabupaten Batang sebagai daerah percontohan pelaksanaan kartu tani, akan tetapi dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Batang, Kecamatan Limpung merupakan kecamatan yang transaksi penggunaan kartu taninya paling banyak yaitu 112 transaksi. Berdasarkan data monitoring transaksi kartu tani di Kecamatan Limpung, semua desa menggunakan kartu tani untuk membeli pupuk subsidi.

Permasalahan yang sama juga dialami oleh Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo, meskipun kedua desa tersebut merupakan desa yang memiliki transaksi

kartu tani paling banyak di Kecamatan Limpung namun persentase penggunaannya masih belum optimal. Program kartu tani sangat penting mengingat data di dalamnya dapat digunakan untuk banyak hal diantaranya memperkuat basis data pemerintah, sedangkan disisi lain untuk program tersebut didanai pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kerjasama dengan pihak Bank BRI. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk menganalisis strategi agar kartu tani dapat digunakan lebih optimal oleh petani Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang akan dijawab penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apa saja manfaat adanya kartu tani di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo?
- 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kartu tani di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo?
- 3) Bagaimana strategi optimalisasi penggunaan kartu tani Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo?

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis:

- 1) Manfaat adanya kartu tani di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo
- 2) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kartu tani di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo
- 3) Strategi optimalisasi penggunaan kartu tani di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo.

### 1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan kebijakan penerapan teknologi baru kepada petani. Selain itu dapat bermanfaat untuk mengkaji kebijakan di sektor keuangan dalam meningkatkan akses petani terhadap layanan keuangan atau *financial inclusion* serta diketahuinya strategi penggunaan kartu tani di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.

#### 2) Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi dinas atau instansi yang membutuhkan gambaran pelaksanaan kartu tani di lapangan seperti Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Batang, Balai Penyuluh Pertanian, Bank BRI. Selanjutnya dengan mengetahui pelaksanaan program kartu tani tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan dan kebijakan strategis pada bidang pertanian.



**UNNES**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1 Teori Akses Keuangan**

Akses terhadap jasa keuangan formal menurut World Bank (2010) telah diakui secara luas akan peranan pentingnya di dalam meningkatkan sistem ekonomi dan keuangan yang inklusif, mengurangi ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan di seluruh dunia. Akan tetapi, hanya sekitar setengah dari penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap jasa keuangan formal. Bank umum, yang mendominasi sektor keuangan Indonesia, secara relatif hanya melayani sebagian kecil rumah tangga Indonesia. Kurang dari setengah penduduk Indonesia yang memiliki tabungan di bank, sementara hanya 17% penduduk yang meminjam dari bank. Peningkatan akses terhadap jasa keuangan formal tidak hanya akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial; tetapi juga akan memberikan keuntungan bagi Pemerintah dan bank umum.

Di Indonesia, masih terdapat sejumlah besar permintaan yang belum terpenuhi dimana konsumen menginginkan layanan keuangan formal namun tidak dapat memperolehnya, karena berbagai sebab, seperti tidak adanya produk yang tepat dan keterpencilan daerah mereka secara geografis. Kebijakan-kebijakan di masa lalu umumnya hanya menekankan pada pemeliharaan stabilitas sektor keuangan secara menyeluruh. Padahal, stabilitas dan peningkatan akses dapat dicapai secara beriringan.

World Bank dalam tulisan ini ini menjelaskan bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangatlah penting dalam meningkatkan akses terhadap jasa keuangan tanpa meningkatkan biaya bagi penyedia jasa. Bank memiliki sejumlah pilihan TIK yang dapat menggantikan peranan transaksi melalui kantor cabang. Dalam penggunaan TIK seperti mobile banking dan penyediaan layanan berbiaya rendah untuk meningkatkan jangkauan operasional, skala keekonomian (economies of scale) yang dapat dicapai melalui penggunaan agen ritel sangatlah penting untuk menurunkan biaya per unit ke tingkat yang ekonomis, sehingga kemitraan pemerintah swasta harus didorong sebagai sarana untuk merancang dan menguji coba produk-produk inovatif untuk meningkatkan keterlibatan kelompok berpenghasilan rendah, seperti TKI, dalam sistem keuangan inklusi.

Permasalahan umum dari layanan keuangan digital adalah pada proses penetrasi layanan tersebut ke masyarakat. Meskipun teknologi sudah dikembangkan untuk memudahkan dan memperluas akses layanan keuangan, pada akhirnya kesediaan masyarakat untuk menggunakan layanan tersebutlah yang akan menentukan keberhasilannya sebagai bagian dari suatu sistem pembayaran.

Mbiti dan Aker (2010) menemukan bahwa sebagian besar pengguna dari layanan keuangan digital di Afrika adalah masyarakat yang secara ekonomi berkecukupan dan memiliki akses terhadap layanan perbankan. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pengguna telepon seluler dan M-PESA (sebuah layanan pengiriman uang berbasis telepon seluler milik perusahaan telco Safaricom di Kenya) mengungkap bahwa pengguna M-PESA pada tahun 2009 sebagian besar

adalah, masyarakat yang tergolong tidak miskin (52,4%), tinggal di perkotaan (62,2%), dan memiliki rekening bank (71,9%). Hal ini mencerminkan adanya masalah dalam penetrasi layanan keuangan digital ke masyarakat, khususnya golongan masyarakat *unbanked* dan *underbanked*.

Untoro *et al* (2013) mengemukakan bahwa penetrasi layanan keuangan digital yang tidak sempurna tersebut dapat disebabkan oleh faktor kebiasaan, kepercayaan, dan tingkat edukasi keuangan masyarakat. Di Indonesia, secara umum masyarakat golongan *unbanked* dan *underbanked* terbiasa melakukan transaksi keuangan yang menggunakan kertas (*paper based*). Keterbatasan masyarakat dalam mengakses seluruh layanan yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan nonbank mengakibatkan pengetahuan mereka terbatas dan mereka tidak sepenuhnya dapat merasakan manfaat yang berasal dari kemajuan teknologi dan sistem pembayaran.

Hambatan dan resiko dari pelaksanaan layanan keuangan digital melalui infrastruktur *telco*, khususnya untuk kegiatan transaksi *m-payment* di Indonesia. Hambatan tersebut antara lain adalah (1) kurang handalnya jaringan bagi pengguna layanan yang mengganggu kelancaran proses transaksi; (2) lemahnya kesadaran pengguna layanan dalam memahami kegunaan dari setiap fitur layanan, risiko yang dapat terjadi, dan cara bertransaksi yang aman.; (3) rendahnya pengetahuan pelanggan terhadap penggunaan layanan; (4) rendahnya kesadaran bagi pengguna layanan untuk memberikan data-data pribadi yang dibutuhkan terkait dengan masalah privasi untuk mendukung pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

### 2.1.2 Teori Pertanian dan Teknologi

Todaro dan Smith (2003), apabila tujuan utama pembangunan pertanian dan daerah pedesaan di negara-negara berkembang adalah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di pedesaan melalui peningkatan pendapatan, total produksi (output), dan produktivitas petani kecil, maka hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengidentifikasi sumber-sumber pokok kemajuan pertanian dan kondisi dasar yang akan mempengaruhi tujuan utama tersebut.

Sumber-sumber kemajuan pertanian skala kecil adalah sebagai berikut:

a. **Kemajuan Teknologi dan Inovasi**

Ada dua sumber pokok inovasi teknologi yang berpotensi meningkatkan hasil pertanian yaitu mekanisasi pertanian atau pengenalan mesin-mesin produksi guna menggantikan tenaga kerja manusia dan pengenalan inovasi biologis (bibit unggul) dan produk-produk kimia penunjang pertanian (pupuk, pestisida, insektisida, dan lain-lain). Inovasi ini sangat cocok untuk negara berkembang terutama untuk daerah tropis dan subtropis, guna mengembangkan potensi dan meningkatkan output pertanian di negara-negara berkembang.

b. **Kebijakan Harga dan Kelembagaan: Penyediaan Insentif Ekonomi yang Diperlukan**

Inovasi dan teknologi pemerintah setelah terpenuhi perlu membuat lembaga-lembaga dan kebijakan dan memperkenalkannya kepada petani. Lembaga tersebut dapat membantu petani kecil memperoleh akses kredit. Aspek penting berikutnya dari kebijakan pemerintah yang harus segera diperbaiki menyangkut penetapan harga komoditi pertanian terutama harga biji-bijian bahan pangan pokok.



Selain harus menyesuaikan struktur kelembagaan dan pasar perkreditan, memberikan rangsangan atau insentif ekonomi kepada petani kecil dan menengah dengan cara menerapkan suatu kebijakan harga akan menjamin sejumlah keuntungan bagi petani.

Ding Xuedong (2006) mengemukakan bahwa transfer teknologi di bidang pertanian memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian serta pendapatan petani, mendorong re-strukturisasi pertanian, dan mempercepat pembangunan desa yang kaya. Mengingat kesulitan transfer teknologi pertanian di Cina, menurut "Green Box Policy", menempatkan masalah pada agenda atas dan menarik lebih banyak modal dari setiap jalan masyarakat untuk mendukung transformasi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggambarkan pendekatan bahwa pemerintah China telah mempercepat peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian, dan menguraikan mekanisme ilmu pengetahuan dan teknologi inovasi dan transformasi di Cina.

### **2.1.3 Teori Pengembangan Keuangan Inklusif Petani**

Tantangan untuk mengembangkan keuangan inklusif bagi petani dapat dilihat dari instansi keuangan mikro. Instansi keuangan mikro perlu merencanakan, menyiapkan dan adaptasi sumber daya. Penyedia keuangan harus menerapkan latihan yang baik untuk mengatasi tantangan seperti memberikan produk keuangan pertanian yang spesifik, mengembangkan peralatan untuk me-manage pertanian dan resiko, menyediakan bantuan teknis, dan melakukan interaksi dengan petani melalui kelompok untuk mengurangi biaya.

Keuangan inklusif menunjukkan jumlah kesenjangan apabila dilihat dari daerah pedesaan dan penyediaan layanan keuangan untuk aktivitas pertanian yaitu meliputi ketidaksetaraan akses, jangkauan layanan yang sempit, produk yang tidak sesuai dengan permintaan dan keadaan. Apabila kesenjangan tersebut dapat diatasi maka keuangan inklusif dapat menggerakkan petani kearah modern (Vega, 2015)

#### **2.1.4 Teori Adopsi Teknologi**

Niat adopsi teknologi baru juga ditentukan oleh karakteristik individu pengadopsi (Mizar et al, 2008). Roger (2003) menyatakan berdasarkan karakteristik individu seperti kondisi sosial ekonomi, perilaku dalam berinteraksi dan berkomunikasi maka perilaku dalam mengadopsi sebuah inovasi dapat dipilah menjadi lima kategori yaitu inovator, early adopter, early majority, late majority, dan laggards. Studi empiris menunjukkan bahwa innovator biasanya adalah individu yang lebih muda (Suharti et al, 2014). Adapun individu yang berusia tua cenderung tergolong dalam kelompok laggards, mereka sangat lamban dalam mengadopsi teknologi baru sebab mereka menerapkan tahap per tahap mulai dari observasi sampai pada tahap penerapan. Penerapan akan dilakukan jika mereka sudah sangat yakin terhadap manfaat dan kerugian yang timbul dari kegiatan penerapan teknologi baru tersebut (Hendryx, 2008).

#### **2.1.5 Konsep Implementasi Kebijakan**

Penerapan implementasi sebuah kebijakan atau program menurut Wardhana dalam Rahina (2016), terdapat konsep triple helix yaitu “Academic, Bussiness, Goverment”. Bisnis berperan sebagai rumah produksi sementara pemerintah adalah sumber hubungan kontraktual yang memastikan interaksi dan pertukaran yang

stabil, dan Universitas sebagai sumber pengetahuan dan teknologi baru. Sinergi dari ketiga sektor ini merupakan merupakan prinsip generatif dalam membangun yang berbasis pengetahuan yang memungkinkan tercapainya integrasi ekonomi yang lebih erat.

Konsep triple helix menjelaskan bahwa hasil penelitian universitas diharapkan tidak hanya melayani kebutuhan ilmu pengetahuan, namun juga sebagai solusi permasalahan pemerintah di dalam menentukan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan masyarakat pebisnis. Pihak pemerintah perlu memberikan stimulus positif yang dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan investasi bisnis sekaligus mendorong atmosfer bisnis yang kondusif. Caranya adalah dengan mengurangi pembatasan-pembatasan yang menyulitkan perkembangan dan inovasi berbisnis, melindungi karya-karya inovasi bisnis, dan mengimplementasikan aturan pemerintah yang berkaitan etika berbisnis sehingga tercipta persaingan bisnis yang sehat. Di sisi lain pihak industri juga mempunyai kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam menciptakan iklim bisnis yang baik, seperti menerapkan etika berbisnis, berkomitmen pada corporate responsibility, dan menjadi partner pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional. Menyeimbangkan peran dari ketiga pihak yaitu akademisi, pemerintah dan pebisnis ini bukanlah hal mudah. Diperlukan upaya yang berkesinambungan dan dinamis sehingga semua pihak diharapkan open- minded dan berusaha melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Ketiga pihak tidak dapat berdiri sendiri, oleh karenanya diperlukan kerjasama yang sinergis dan seimbang.

### 2.1.6 Reformasi Kredit Pertanian dan Financial Inclusion di India

Pertumbuhan pertanian yang cepat tidak hanya akan menjamin keamanan pangan lanjutan tetapi juga membantu dalam pertumbuhan industri dan PDB. Untuk mempertahankan pertumbuhan di sektor pertanian, sangat penting bahwa modal yang dibutuhkan harus diinvestasikan karena modal merupakan salah satu masukan penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan semua program pembangunan pertanian. Oleh karena itu, pembiayaan untuk pertanian merupakan tugas penting untuk memenuhi permintaan modal di bidang pertanian India selain itu kredit bagi petani juga memiliki peranan yang penting dalam proses mempercepat pertanian karena kredit pertanian menjadi kekuatan meningkatkan produktivitas, produksi dan profitabilitas pertanian untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan.

Pertanian yang dinamis dan bersemangat secara efektif akan mengatasi masalah kemiskinan di pedesaan (Kumar, 2014). Oleh karena itu pertanian bukan hanya masalah ekonomi dan perdagangan saja tetapi martabat dan kelangsungan hidup (Nagaraju, 2014). Jadi pertanian adalah akar dari kemakmuran di pedesaan India. Kredit merupakan elemen kunci dalam modernisasi pertanian dan mempercepat adopsi teknologi baru. Hal ini juga merupakan bagian integral dari proses komersialisasi ekonomi pedesaan.

Inklusi keuangan adalah program unggulan dimulai oleh RBI untuk membawa orang di bawah lingkup inklusi keuangan formal. Sekarang fakta menetapkan bahwa tanpa akses ke pembiayaan formal dengan biaya terjangkau, pertumbuhan inklusif tidak mungkin. Dalam rangka memberikan kredit ke sektor pertanian yang memiliki potensi lapangan kerja di daerah pedesaan, Reserve Bank

of India (RBI) telah melakukan beberapa program yang termasuk merevisi pedoman pinjaman sektor prioritas. Di bawah skema ini RBI telah mengadopsi kebijakan pemberian kredit melalui beberapa saluran dan menyederhanakan prosedur untuk petani kecil dan marjinal.

Tanpa akses ke pembiayaan formal dengan biaya terjangkau, pertumbuhan inklusif tidak mungkin. Dalam rangka memberikan kredit ke sektor pertanian, yang memiliki potensi lapangan kerja di daerah pedesaan, RBI telah melakukan beberapa program yang termasuk merevisi pedoman pinjaman sektor prioritas. Di bawah skema ini RBI telah mengadopsi kebijakan pemberian kredit melalui beberapa saluran dan prosedur menyederhanakan untuk petani kecil dan marjinal. Sejak tahun 2004, telah terjadi lonjakan kredit pertanian karena Pemerintah India melakukan inisiatif seperti penggandaan Kredit Pertanian, Skema Pembebasan Utang dan Penguatan Koperasi. Oleh karena itu model yang lebih inovatif diperlukan agar program dapat dinikmati petani kecil dan marjinal di daerah pedesaan untuk keberhasilan program inklusi keuangan.

### **2.1.7 Inklusi Keuangan dan Kebutuhan Pembangunan Pertanian**

Sekitar 62% dari penduduk India tergantung pada pertanian karena sektor pertanian juga menyediakan lapangan kerja bagi hampir 52 persen dari angkatan kerja. Namun adanya stagnasi produktivitas pertanian, peningkatan biaya produksi, distorsi di pasar dan miskin infrastruktur telah membuat mata pencaharian penduduk pertanian yang lebih sulit oleh karena itu dibutuhkan lembaga keuangan yang kuat sebagai pilar pertumbuhan ekonomi. Alasan kemiskinan di pedesaan meningkat menurut penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah

di bidang pertanian, produktivitas yang rendah, gagal panen, adopsi yang rendah sektor pertanian terhadap teknologi, akses rendah terhadap kredit dan lembaga keuangan. Sehingga pertumbuhan pertanian adalah obat mujarab untuk pengentasan kemiskinan pedesaan dan transformasi sosial di India.

### **2.1.8 Kartu Tani**

#### **2.1.8.1 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI)**

Permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi dapat diatasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI) melalui Kartu Tani yang dibagikan kepada masing-masing petani digunakan sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi. Aplikasi SIMPI diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran bagi para petani penerima pupuk bersubsidi.

SIMPI adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi untuk petani. Aplikasi SIMPI digunakan untuk melakukan input data dan menyimpan database petani yang berisi diantaranya data yang terdapat di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), identitas pribadi dan jumlah alokasi pupuk bersubsidi serta monitoring transaksi pembayaran pupuk bersubsidi untuk petani di pengecer yang telah ditentukan oleh pemerintah. Aplikasi SIMPI membutuhkan data usulan RDKK masing-masing kelompok tani dan data alokasi pupuk bersubsidi, serta administrator user yang memiliki akses untuk mengelola (membuat/mengubah/menghapus) seluruh User yang ada dalam aplikasi SIMPI.

### **2.1.8.2 Pengertian Kartu Tani**

Kartu Tani adalah kartu debit BRI co-branding yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi Pupuk Bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di mesin Electronic Data Capture (EDC) BRI yang ditempatkan di pengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya. Setiap transaksi penebusan pupuk bersubsidi secara otomatis akan mengurangi alokasi pupuk bersubsidi dan saldo di dalam rekening tabungan petani. Di dalam sistem manajemen kuota akan tersimpan data base petani sesuai dengan RDKK dan kuota masing-masing petani, serta termonitor data petani yang membeli pupuk bersubsidi, jumlah pupuk yang sudah terjual dan sisa pupuk bersubsidi yang belum terbeli.

### **2.1.8.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran Kartu Tani**

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Aplikasi SIMPI melalui Kartu Tani adalah terwujudnya pendistribusian, pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada para petani yang berhak menerima. Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan Asas 6 (enam) Tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga) serta pemberian layanan perbankan bagi petani. Sasaran dari penerapan Kartu Tani ini adalah semua petani di Jawa Tengah dengan kriteria :

- a. Tergabung dalam kelompok tani dan telah diusulkan untuk memperoleh pupuk bersubsidi melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;

- b. Mengusahakan lahan bagi petani, pekebun dan peternak dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga;
- c. Memiliki rekening tabungan Simpedes BRI.

Pihak yang terlibat dalam program kartu tani:

- a. Petani
- b. Kios Pengecer
- c. Pemerintah
- d. Bank BRI

#### **2.1.9 Subsidi Pupuk**

Program subsidi pupuk bagi petani adalah program nasional yang bertujuan untuk membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk sesuai kebutuhannya dalam kegiatan usahatani dengan harga terjangkau agar dapat meningkatkan produksi pertanian dan menambah pendapatan serta memperbaiki kesejahteraannya. Kebijakan pemberian subsidi pupuk untuk sektor pertanian telah dilakukan sejak tahun 2003 dan dilanjutkan hingga saat ini. Pada tahun 2010, sesuai Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010, telah ditetapkan anggaran subsidi harga pupuk sebesar Rp 11.291 triliun, untuk pemberian pupuk urea, Sp-36, ZA, NPK, dan pupuk organik. Selanjutnya kebijakan subsidi pupuk tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/permentan/SR.130/2009 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.



Tersedianya pupuk bersubsidi sampai di tingkat petani secara tepat yaitu tepat jumlah, jenis, waktu, dengan mutu terjamin dan harga sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah. Tersalurnya pupuk bersubsidi kepada petani harus melalui syarat, antara lain :

- 1) Berprofesi Sebagai Petani.
- 2) Memiliki Lahan Tidak Lebih Dari 2 Ha.
- 3) Tergabung Dalam Kelompok Tani

Pupuk bersubsidi menurut SK Menteri Prindustrian dan Perdagangan No.356/MPP/Kep/5/2004 adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Pengadaan ini merupakan proses penyediaan pupuk oleh produsen sedangkan penyalurannya merupakan proses pendistribusian pupuk dari tingkat produsen sampai dengan tingkat konsumen. Artinya pupuk bersubsidi memang diberikan oleh pemerintah kepada produsen pupuk yang selanjutnya proses pengadaan pupuk kepada para petani dengan memberikan harga pupuk yang terjangkau.

#### **2.1.10 Keuangan Inklusif**

Strategi Nasional Keuangan Inklusif menjelaskan pengertian keuangan inklusif sebagai:

Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil.

Pengertian keuangan inklusif menurut Tambunan (2016) upaya memperluas partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah (miskin), dalam semua kegiatan perbankan, terutama simpanan dan pinjaman, atau dalam artian yang lebih luas, keuangan inklusif merupakan kemampuan masyarakat mengakses berbagai lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank.

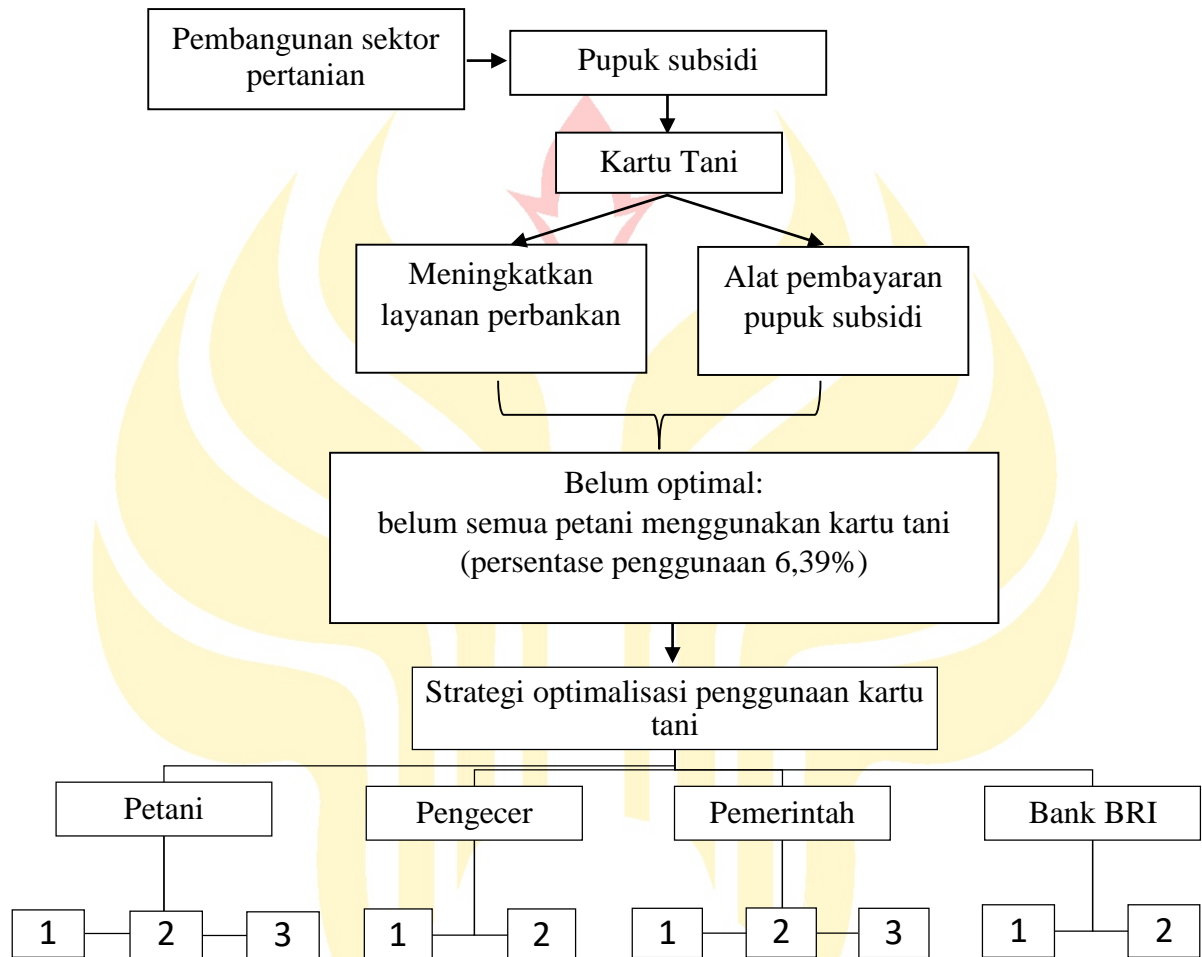
Franklin Allen et al (2013) yang dikutip oleh Wijaya (2013) dalam Tambunan (2016) keuangan inklusif didefinisikan sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal, dalam hal ini bank sebagai lembaga intermediasi, yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan. Salah satu ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif adalah indikator keuangan inklusif. Dari beberapa referensi, Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan keuangan inklusif adalah:

- a. Ketersediaan/akses: mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
- b. Penggunaan: mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (a.l. keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan).
- c. Kualitas: mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.
- d. Kesejahteraan: mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

## 2.2 Kerangka Berpikir

Provinsi Jawa Tengah dalam rangka membangun sektor pertanian meluncurkan kartu tani untuk menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk besubsidi agar dapat diterima secara benar oleh petani yang berhak. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memilih Kabupaten Batang sebagai daerah percontohan pelaksanaan kartu tani yang nantinya akan menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Tengah, akan tetapi dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Batang, Kecamatan Limpung merupakan kecamatan yang transaksi penggunaan kartu taninya paling banyak yaitu 112 transaksi.

Desa Kalisalak dan Desa Sidomulo berdasarkan data monitoring transaksi kartu tani merupakan desa dengan transaksi paling banyak, namun hal tersebut dinilai belum optimal, karena belum semua petani menggunakan kartu tani untuk membeli pupuk subsidi, persentase penggunaan kartu tani di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo hanya 6,39%, sehingga diperlukan penelitian untuk menganalisis strategi agar kartu tani dapat digunakan lebih optimal oleh petani Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.



**Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Strategi Optimalisasi Penggunaan Kartu Tani di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang**

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Penelitian tentang Strategi Optimalisasi Penggunaan Kartu Tani di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo menggunakan *mix methods*. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis deskriptif terkait manfaat adanya kartu tani di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo, bagi petani adanya kartu tani mempermudah petani memperoleh pupuk subsidi dan membuat petani lebih mengenal layanan perbankan serta memudahkan petani yang ingin menabung atau mengisi saldo kartu tani menggunakan alat EDC yang ada di kios pengecer tanpa harus pergi ke bank BRI. Bagi kios pengecer adanya kartu tani memberikan mereka tambahan penghasilan dari biaya administrasi yang dibebankan kepada petani atau masyarakat umum yang membutuhkan layanan perbankan seperti menabung, transfer atau membayar tagihan listrik. Manfaat bagi pemerintah yaitu dapat diperoleh data yang lebih valid mengenai jumlah petani, luas lahan dan kebutuhan pupuk. Kartu tani memberikan manfaat bagi Bank BRI karena dapat menambah agen brilink.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kartu tani di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo apabila dilihat dari aspek petani, masalah yang dihadapi adalah masih banyak petani yang belum paham betul tentang kartu tani, kurangnya dukungan media informasi, kurangnya peranan perangkat desa untuk menunjang program kartu tani serta adanya data yang belum *update*

sehingga perlu pendataan ulang. Permasalahan yang dialami oleh kios pengecer dalam pelaksanaan program kartu tani adalah adanya dilema antara mendukung memenuhi target penjualan dan mendukung program kartu tani. Permasalahan dari aspek pemerintah yang diwakili oleh penyuluh pertanian adalah belum adanya tim koordinator dengan anggaran khusus guna seluruh mengawal proses kartu tani sehingga dibutuhkan Tim Koordinator dengan anggaran khusus untuk mengawal proses kartu tani, sejak tingkat kelompok tani hingga tingkat kecamatan, pendampingan dari pemerintah pusat agar penyuluh pertanian lebih menguasai sistem SIMPI serta adanya evaluasi hasil pendataan dan proses pendataan berkelanjutan akan membuat data jumlah petani semakin valid dan kartu tani dapat dibagikan secara merata. Sedangkan dari aspek Bank BRI permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya SOP kartu tani serta kurangnya tenaga kerja yang membantu menangani kartu tani.

3. Strategi optimalisasi penggunaan kartu tani di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo yang dilakukan menggunakan alat analisis AHP aspek yang menjadi prioritas secara berurutan adalah aspek Bank BRI, aspek kios pengecer, aspek petani, dan aspek pemerintah. Adapun secara keseluruhan urutan alternatif strategi optimalisasi penggunaan kartu tani di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo adalah pembagian Kartu Tani dan buku rekening dengan dibantu oleh petugas penyuluh serta aparat desa setempat, penjelasan serta koordinasi Pengecer – Distributor pupuk yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Batang, disusun SOP kartu tani, adanya *reward* bagi pengecer yang disiplin, publikasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, dibentuk Tim Koordinator dengan anggaran khusus untuk

mengawal proses kartu tani, adanya evaluasi hasil pendataan dan proses pendataan berkelanjutan, pendampingan dari pemerintah pusat kepada penyuluh, penyuluhan dan penjelasan kepada petani melalui perangkat desa, mendata ulang dan memastikan semua petani memiliki kartu tani.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diajukan beberapa saran agar penggunaan kartu tani di Desa Kalisalak dan Desa Sidomulyo dapat lebih optimal, antara lain:

1. Pihak penyuluh, perbankan, pihak aparat desa dan universitas agar lebih rutin memberikan penyuluhan dan *sharing* informasi terbaru tentang teknologi atau layanan perbankan kepada petani.
2. Diperlukan upaya yang berkesinambungan dan dinamis dari petani, kios pengecer, penyuluh pertanian dan bank BRI sehingga semua pihak diharapkan *open-minded* dan berusaha melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama karena keempat pihak tidak dapat berdiri sendiri, oleh karenanya diperlukan kerjasama yang sinergis dan seimbang. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian yang membandingkan perbedaan sebelum dan sesudah diterapkan kartu tani secara komprehensif

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ali et al. (2016). Kartu Tani Tetap Dipaksakan. Dalam Suara Merdeka. Tahun 2016. 10 Maret.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. (2016). *Kabupaten Batang Dalam Angka*. Batang: BPS Kabupaten Batang.
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Gringsing. (2016). *Kecamatan Gringsing Dalam Angka*. Batang: BPS Kecamatan Gringsing.
- Bank Indonesia. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: Grup Pengembangan Keuangan Inklusif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM.
- Bank Indonesia. (2014). *Financial Literacy Baseline Survey*. Jakarta: Grup Pengembangan Keuangan Inklusif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM.
- Bappenas. (2007). Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Dalam Rangka Mendorong Pembangunan Wilayah Tertinggal. *Laporan Akhir*. Jakarta: Direktorat Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal.
- Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Demirguc-Kunt, Beck dan Martinez. (2007). *Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access*. Washington, DC: The World Bank.
- Global Partnership for Financial Inclusion. (2015). *New Trends In Agricultural Finance. Sythesis Report*. Disampaikan pada G20 Global Partnership for Financial Inclusion, SME Finance Sub-Group di Turki, Oktober 2015.
- Ghosh, Jayati. (2013). *Microfinance And The Challenge Of Financial Inclusion For Development*. *Cambridge Journal of Economics*, Volume 37. Hal. 1203-1219. Downloaded from <http://cje.oxfordjournals.org/> at Gadjah Mada University on March 18, 2016
- Hendryx, Jennifer L. (2008). *Generational Differences in Learner Attitudes Toward Technology in Education at the University of Wisconsin-Stout*. American Psychological Association, 5th edition. Number of Pages: 137. America: The Graduate School University of Wisconsin-Stout



- International Labour Office. (2015). *Empowering Rural Communities Through Financial Inclusion*. ILO. Rural Finance Team: [sfp@ilo.org](mailto:sfp@ilo.org)
- Karsinah. (2013). *Identifikasi Keluarga Miskin di Sektor Pertanian Dan Non Pertanian Kabupaten Bantul*. *Journal of Economics and Policy*, Volume 6 No 2. Hal. 103-213 Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Petunjuk Teknis Aplikasi Simpi Melalui Kartu Tani Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015*. Semarang: Diperoleh dari Setbakorluh Provisinsi Jawa Tengah
- Kumar, Anjani t al. (2010) July-December. *Institutional Credit to Agriculture Sector in India: Status, Performance and Determinants*. *Agricultural Economics Research Review*, Volume 23. Hal. 253-264. Electronic copy Diperoleh dari: <http://ssrn.com/abstract=2026313>
- Kumar, Dushyant. (2014). *Agriculture Credit Reform And Financial Inclusion In India*. *International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research*, Vol 1 No 2349-5677. Halaman 70-84
- Maharani, Esthi. (2015) BRI Terbitkan Kartu Tani. Dalam *Republika*. No c87. Tahun 2015. 5 Maret.
- Mbiti M, Isaac dan Aker, C Jenny. (2010). *Mobile Phones and Economic Development in Africa*. [www.cgdev.org](http://www.cgdev.org)
- Mizar, M. Alfian et al. (2008). "Tipologi Dan Karakteristik Adopsi Teknologi Pada Industri Kecil Pengolah Hasil Pertanian". Disajikan dalam Prosiding Seminar Nasional Teknik Pertanian 2008 – Yogyakarta, 18-19 November 2008.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nagaraju, Bandameedi. (2014). *Financial Inclusion and Need for Agricultural Development: an Analysis*. *Global Journal For Research Analysis*, Volume 3. No.2277 – 8160. Hal. 29-30
- Prajanti, Suchatiningsih Dian Wisika. (2013). *The Use of Information and Comunication Tchnology (ICT) to Improve the Performance of Agriculture Extention in Central Java*. Makalah disajikan dalam International Conference of Organizational Innovation, Thailand, 2-4 Juli.
- Pramana, Novi. (2017). *Strategi Perlindungan Lahan Sawah Irigasi Di Kabupaten Semarang*. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Unnes

- Pranowo, Ganjar. (2015). *Kartu Tani, Tutup Penyimpangan Distribusi Pupuk*. [www.masganjar.id](http://www.masganjar.id) (28 januari 2017)
- Purwati, Yenny., Franksiska, Rosaly, dan Nugroho, Paskah Ika. (2014). *Strategi Peningkatan Kemampuan Adopsi Teknologi Branchless Banking Untuk Memperluas Inklusi Keuangan Di Masyarakat Pedesaan. Seminar Nasional dan Call For Paper*. Research Methods And Organization Studies Halaman 204-211.
- Rahina. (2016). Peran Akademisi Dalam Kontruksi City Branding. [blog.unnes.ac.id/rahinadkv/2016/2016/06/01/peran-akademisi-dalam-kontruksi-city-branding/](http://blog.unnes.ac.id/rahinadkv/2016/2016/06/01/peran-akademisi-dalam-kontruksi-city-branding/) (29 Januari 2017)
- Rakhmawati, Tina. (2013) Analisis Efektivitas Subsidi Pupuk dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi (Studi Kasus Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor). *Skripsi*. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB
- Rogers, Everett M. (2003). *Diffusion of Innovations, 5th ed.* A Division of Macmillan Publishing Co Inc, New York: Free Press.
- Setiawan, Avi Budi dan Prajanti, Suchatiningsih Dian Wisika. (2016). *Strategies To Develop Food Crop Commodity To Improve The Prosperity Of Rural Farmers In Grobogan District. Journal of Indonesian Applied Economics*, Volume 6 No.2. Hal 176-190. Malang: Universitas Brawijaya
- Solomon Olajide Fadun. (2014). *Financial Inclusion, Tool for Poverty Alleviation and Income Redistribution in Developing Countries: Evidences from Nigeria. Academic Research International*, Volume 5 No.3. Hal. 137-146
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharti et al. (2014). *Technology Innovation Adoption Model among SME Tempe Producer (A Study on Tempe Producer in Jawa Tengah, Indonesia)*. International Journal of Business and Management Invention ISSN (Online): 2319 – 8028, ISSN (Print): 2319 – 801X [www.ijbmi.org](http://www.ijbmi.org) Volume 3 Issue 2February. 2014| PP.05-14

- Suryana, Achmad et al. (2015). Analisis Kebijakan Perpupukan Menunjang Ketahanan Pangan Nasional. *Laporan Akhir*. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian.
- CGAP (The Consultative Group to Assist the Poor) . (2006). *Using Technology To Build Inclusive Financial Systems*. CGAP Web site [www.cgap.org](http://www.cgap.org)
- Tambunan, Tulus. (2016). *Pembangunan Ekonomi Inklusif, Sudah Sejauh Mana Indonesia?*. Jakarta: LP3ES.
- Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Untoro et al., (2014). Layanan Keuangan Digital: *Hambatan dan Faktor-faktor Penentu Keberhasilan*. *Working Paper Bank Indonesia*. WP/11/2014. Indonesia: Bank Indonesia
- Vega, Claudio González. (2015). “Financial inclusion of smallholder farmers: state-of-the-art and challenges”. *Makalah* disajikan dalam Konferensi Microfinance Best Practice Award Improving Financial Inclusion of Smallholder Farmers di Itali pada tanggal 15-16 Oktober 2015
- Wardhana, Wishnu. (2013). Konsep ABG ‘Academic, Business & Government’, Prinsip Generatif untuk Membangun Ekonomi yang Berbasis Pengetahuan. *Kuliah Umum*. Surabaya: Unair. Diperoleh dari [www.apec2013ceosummit.com/press/kuliah-umum-abac-di-unair-konsep-abg-academic-business-government-prinsip-generatif-untuk-membangun-ekonomi-yang-berbasis-pengetahuan.html](http://www.apec2013ceosummit.com/press/kuliah-umum-abac-di-unair-konsep-abg-academic-business-government-prinsip-generatif-untuk-membangun-ekonomi-yang-berbasis-pengetahuan.html)
- World Bank Office Jakarta. (2010) . *Pengembangan Sektor Keuangan*. Diperoleh dari: <http://www.worldbank.org/id/fpd>
- [Xuedong, Ding. \(2006\). Policy Perspectives Innovation And Technology Transfer In Chinese Agriculture. \*Journal of Small Business and Enterprise Development\* Vol. 13 No.2. Diperoleh dari: \[permissions@emeraldinsight.com\]\(mailto:permissions@emeraldinsight.com\) \( 21 Maret 2017\).](#)